

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tiongkok merupakan negara yang memiliki hubungan baik dengan kedua negara yang berkonflik. Dalam merespon permasalahan yang terjadi antara Thailand dan Kamboja Tiongkok menggunakan pendekatan *Quiet Diplomacy* melalui pertemuan Trilateral maupun *Shuttle Diplomacy* guna menjaga hubungan dengan kedua negara dan menyamakan pikiran dan pendapat dari negara yang berkonflik. Pertemuan Trilateral yang terjadi pada 28-29 Desember 2025 tidak hanya menjadi forum yang menghasilkan kesepakatan senjata, melainkan dilaksanakannya setelah Thailand dan Kamboja menyepakati gencatan senjata pada 27 Desember 2025. Pertemuan tersebut berfungsi sebagai upaya untuk mengonsolidasikan dan memastikan implementasi gencatan senjata serta membangun kembali kepercayaan kedua negara.

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang kembali terjadi pada tahun 2025 bukanlah konflik pertama yang dialami oleh kedua negara, melainkan merupakan bagian dari sengketa perbatasan yang telah berlangsung sejak lama. Perselisihan tersebut berakar pada penetapan garis perbatasan pada masa kolonial Prancis pada awal abad ke-20 dan terus berlanjut meskipun Mahkamah Internasional telah memutuskan status Candi Preah Vihear pada tahun 1962. Ketegangan sebelumnya juga pernah berkembang menjadi konflik bersenjata pada periode 2008 hingga 2011 setelah Candi Preah Vihear ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Meskipun konflik kemudian mereda, persoalan demarkasi perbatasan

belum sepenuhnya terselesaikan sehingga ketegangan kembali muncul pada tahun 2025 dan berkembang menjadi bentrokan bersenjata antara kedua negara. Eskalasi konflik tersebut tidak hanya mengancam hubungan bilateral Thailand dan Kamboja, tetapi juga stabilitas kawasan Asia Tenggara, sehingga mendorong keterlibatan berbagai aktor dalam upaya meredakan konflik. Salah satu aktor yang terlibat adalah Tiongkok, yang memiliki hubungan erat dengan kedua negara, sehingga menempatkannya pada posisi yang kompleks dalam merespons konflik dan menjadikan posisi diplomatik Tiongkok penting untuk dikaji

Dalam konflik Thailand–Kamboja tahun 2025, Tiongkok turut terlibat dalam berbagai upaya penyelesaian konflik melalui komunikasi diplomatik dengan kedua pihak, penyelenggaraan pertemuan trilateral, serta *shuttle diplomacy* yang dilakukan oleh utusan khusus Tiongkok. Dari berbagai tindakan tersebut, Tiongkok menunjukkan peran sebagai *Mediator-Integrator*, *Regional-Subsystem Collaborator* dan *Bridge*. Peran *Mediator-Integrator* terlihat dari upaya Tiongkok mendorong dialog dan mempertemukan kedua pihak, sedangkan peran *Regional-Subsystem Collaborator* tercermin dari dukungan dan kerjasama Tiongkok terhadap upaya penyelesaian konflik dalam kerangka regional, khususnya melalui koordinasi dengan ASEAN untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, peran *Bridge* ditunjukkan melalui upayanya menjembatani komunikasi antara Thailand dan Kamboja.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai posisi diplomatik Tiongkok dalam konflik perbatasan Thailand–Kamboja tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis memberikan saran bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa agar tidak hanya berfokus pada analisis deskriptif mengenai peran suatu negara, tetapi juga dapat mengkaji secara lebih mendalam efektivitas keterlibatan aktor eksternal serta menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi upaya penyelesaian konflik. Penulis juga memberikan saran kepada Tiongkok dan ASEAN untuk terus mendorong Thailand dan Kamboja dalam menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai dan berkelanjutan. Mengingat konflik tersebut tidak hanya berdampak terhadap hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara, diperlukan upaya yang lebih konkret untuk menjaga gencatan senjata, membangun kembali kepercayaan, serta mendorong penyelesaian terhadap akar permasalahan sengketa perbatasan agar konflik serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

